

PERUBAHAN GLOBAL & PENGUATAN PILAR KEBANGSAAN

MELALUI PKn

Winarno*

Abstrak

Pengaruh globalisasi politik adalah akan semakin menguatnya pengaruh ideologi liberal dalam perpolitikan negara-negara berkembang yang ditandai oleh menguatnya ide kebebasan dan demokrasi. Pengaruh globalisasi terhadap bidang politik, antara lain membawa internasionalisasi dan penyebaran pemikiran serta nilai-nilai demokratis, termasuk di dalamnya masalah hak asasi manusia. Disisi lain ada pula masuknya pengaruh ideologi lain seperti ideologi Islam yang berasal dari Timur Tengah. Implikasinya adalah negara semakin terbuka dalam pertemuan berbagai ideologi dan kepentingan politik negara.

Dari sisi negatif, seperti merebaknya *konsumerisme*, *materialisme*, *hedonisme*, *sekularisme*, mengagung-agungkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemewahan yang tidak semestinya, foya-foya, pergaulan bebas, budaya kekerasan, *pornografi*, *pornoaksi*, dan semacamnya. Pengaruh tersebut bukan saja lewat dunia film, namun juga lewat media cetak dan televisi dengan satelitnya, serta yang sekarang sedang menjadi *trend* adalah *internet*.

Perubahan-perubahan yang amat cepat dan terus menerus baik pada dimensi global itu menuntut pula dilakukannya perubahan dan pembaharuan pendidikan di Indonesia khususnya pendidikan yang menyiapkan warganegara agar dapat menjalani kehidupannya secara baik. Salah satu elemen pendidikan yang bertanggung jawab dalam hal penyiapan warganegara demikian adalah pendidikan kewarganegaraan atau *citizenship education*.

Penulis berpendapat, PKn sebagai pendidikan yang sifatnya interdisipliner dapat saja mengemban misi sebagai pendidikan demokrasi sebagai antisipasi kecenderungan global dewasa ini. Namun, menjadikan PKn sebagai pendidikan demokrasi kiranya masih kurang, sebab kita tidak cukup dengan *out world looking* tetapi juga tetap menjadikan *in world looking* sebagai cara pandang. Artinya kita mempergunakan PKn itu dari, oleh dan untuk kita sebagai bangsa. Pendekatan *in world looking* beranjak dari asumsi bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak lepas dari konteks maupun kepentingan bangsa yang bersangkutan.

Empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika) yang sekarang ini tengah gencar disosialisasikan oleh MPR memiliki makna penting, manakala PKn difungsikan sebagai pendidikan kebangsaan termasuk pula pendidikan karakter kebangsaan. Keempat pilar tersebut, menurut hemat penulis, berintikan pesan kebangsaan yang nantinya dapat disampaikan melalui PKn sebagai jalur pendidikan.

Kata Kunci : Penguatan Empat Pilar, Pendidikan Kewarganegaraan

*) Dosen Prodi PPKn, UNS Surakarta

A. Pendahuluan

Peradaban global yang tengah terjadi dewasa ini tidak bisa dipisahkan dari kata peradaban dan global. Peradaban memiliki kaitan dengan kebudayaan. Koentjaraningrat (1990) menyatakan bahwa disamping istilah "kebudayaan" ada pula istilah "peradaban". Hal yang terakhir adalah sama dengan istilah Inggris *civilization* yang biasanya dipakai untuk menyebutkan bagian-bagian dan unsur-unsur dan kebudayaan yang maju, dan indah, seperti misalnya: kesenian, ilmu pengetahuan adat sopan-santun pengaulan, kepandaian menulis, organisasi kenegaraan dan sebagainya. Huntington (1996) mendefinisikan peradaban (*civilization*) sebagai *the highest social grouping of people and the broadest level of cultural identity people have short of that which distinguish humans from other species*. Peradaban tidak lain adalah perkembangan kebudayaan yang telah mendapat tingkat tertentu yang diperoleh manusia pendukungnya. Taraf kebudayaan yang telah mencapai tingkat tertentu tercermin pada pendukungnya

yang dikatakan sebagai beradab atau mencapai peradaban yang tinggi. Istilah "peradaban" sering juga dipakai untuk menyebutkan suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, ilmu pengetahuan, seni rupa, dan sistem kenegaraan dan masyarakat kota yang maju dan kompleks.

Kata "global" dapat bermakna universal. Dari kata global berkembang istilah globalisasi yang saat ini amat dikenal. Globalisasi belum memiliki defim'si yang mapan, kecuali sekadar definisi kerja (*working definition*), sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat.

Globalisasi dimunculkan oleh negara-negara maju, karena mereka merasa telah lebih maju dalam menguasai teknologi, telah merasa memperoleh kemajuan yang sangat pesat

terutama di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi. Negara-negara maju dewasa ini lebih didominasi oleh negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat karena memang kemajuan teknologi negara-negara tersebut dibanding dengan negara lain. Sehingga tidak salah jika Arnold Joseph Toynbee, sejarawan pertengahan abad ke-20, pernah menyatakan: "*Para ahli sejarah di masa mendatang akan berkata bahwa kejadian yang besar di abad ke dua puluh adalah pengaruh kuat peradaban Barat terhadap semua masyarakat di dunia. Mereka juga akan berkata bahwa pengaruh tersebut sangat kuat dan bisa menjungkirbalikkan korbannya....*".

Berdasar pendapat ini, harus diakui bahwa kebudayaan dan peradaban Barat memberi pengaruh besar bagi masyarakat dunia dewasa ini. Tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh faktor kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan dan tingkat pendidikan. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan mempengaruhi peradaban sebuah bangsa. Ini artinya globalisasi yang digerakkan oleh

kemajuan pengetahuan dan teknologi jelas mempengaruhi peradaban. Bagaimana peradaban global dewasa ini berpengaruh terhadap negara bangsa, seperti Indonesia? Apa yang dapat dilakukan melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam hubungannya dengan kecenderungan global saat ini?

B. Proses dan Pengaruh Globalisasi

Globalisasi menunjuk adanya proses. Globalisasi adalah proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antarmasyarakat dunia untuk mengikuti sistem yang sama. Globalisasi dalam arti literal adalah sebuah perubahan sosial, berupa bertambahnya keterkaitan di antara masyarakat dan elemen-elemennya yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi yang memfasilitasi pertukaran budaya dan ekonomi internasional (Kamus Maya Wikipedia).

Globalisasi sendiri merupakan proses yang panjang dalam sejarah dan telah mengalami enam tahapan. Tahapan

itu adalah: a) tahap embrional (tahun 1500-1800), b) tahap pertumbuhan (tahun 1810-1870), c) tahap *take off* (tahun 1870-1920), d) tahap perjuangan hegemoni (tahun 1920-1960), e) tahap ketidakpastian (tahun 1960-1990), dan f) tahap kebudayaan global (setelah 1990).

Keenam tahapan itu merupakan akibat revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi. Revolusi ilmu pengetahuan dengan segala perwujudannya telah mendorong meluasnya budaya global dengan ciri mobilitas tinggi dan arus informasi yang tidak terbendung. Adapun wujud dari arus global ini adalah sebagai berikut;

- a. Arus etnis ditandai dengan mobilitas manusia yang tinggi dalam bentuk imigran, turis, pengungsi, tenaga kerja, dan pendatang. Arus manusia ini telah melewati batas-batas teritorial negara.
- b. Arus teknologi ditandai dengan mobilitas teknologi munculnya *multinational corporation* dan *transnational corporation* yang kegiatannya dapat menembus batas-batas negara.

- c. Arus keuangan yang ditandai dengan makin tingginya mobilitas modal, investasi, pembelian melalui internet penyimpanan uang di bank asing.
- d. Arus media yang ditandai dengan makin kuasanya mobilitas informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik. Berbagai peristiwa di belahan dunia seakan-akan berada di hadapan kita karena cepatnya informasi.
- e. Arus ide yang ditandai dengan makin derasnya nilai baru yang masuk ke suatu negara. Dalam arus ide ini muncul isu-isu yang telah menjadi bagian dari masyarakat internasional. Isu-isu ini merupakan isu internasional yang tidak hanya berlaku di suatu wilayah nasional negara.

Kenichi Ohmae dalam *The End of Nation State* (1996) menyatakan adanya 4 (empat) arus I dalam globalisasi yakni arus investasi, industri, informasi dan individu. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa arus budaya global terutama arus ide dan informasi telah memunculkan berbagai isu internasional. Kita sebagai bangsa tidak

dapat lagi mengisolasi diri karena batas-batas negara tidak mampu lagi menutup serbuan arus global. Saling ketergantungan dan hubungan antarbangsa telah menjadikan bangsa kita harus berinteraksi dan berkompetisi untuk kemajuan.

Alvin Toffler dalam bukunya *The Third Wave* (1980) menyatakan bahwa sekarang ini kita berada pada gelombang III yakni peradaban informasi yang berlangsung mulai 1970M sampai sekarang. Gelombang tiga merupakan *revolusi informasi* yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang memudahkan manusia untuk berkomunikasi dalam berbagai bidang. Gelombang ini melahirkan suatu masyarakat dunia yang dikenal dengan sebutan *the global village* (kampung global). Diperkirakan era informasi ini akan mencapai puncaknya pada 10-20 tahun mendatang.

John Naisbitt dalam bukunya *Megatrends 2000* (1991), menyatakan bahwa globalisasi memunculkan perubahan-perubahan yang akan dialami oleh negara-negara dunia. Perubahan itu terjadi karena interaksi yang dekat dan

intensif antar negara terutama negara berkembang akan terpengaruh oleh kemajuan di negara-negara maju. Perubahan-perubahan tersebut adalah

1. Perubahan dari masyarakat industri ke masyarakat informasi
2. Perubahan dari teknologi yang mengandalkan kekuatan tenaga ke teknologi canggih
3. Perubahan dari ekonomi nasional ke ekonomi dunia
4. Perubahan dari jangka pendek ke jangka panjang
5. Perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi
6. Perubahan dari bantuan lembaga ke bantuan diri sendiri
7. Perubahan dari demokrasi perwakilan ke demokrasi partisipatori
8. Perubahan dari sistem hierarki ke jaringan kerja
9. Perubahan dari Utara ke Selatan
10. Perubahan dari satu diantara dua pilihan menjadi macam-macam pilihan

Globalisasi sebagai fenomena abad sekarang memberi implikasi yang luas bagi semua bangsa dan masyarakat

internasional. Dengan didukung teknologi komunikasi dan transportasi yang canggih, dampak globalisasi akan sangat luas dan kompleks. Menurut Malcolm Waters (1995), ada tiga tema atau dimensi utama globalisasi yaitu *political globalization*, *economic globalization*, dan *cultural globalization*. *Economic globalization* atau globalisasi ekonomi ditunjukkan dengan tumbuhnya pasar uang dunia, zona perdagangan bebas, pertukaran global akan barang dan jasa serta tumbuhnya korporasi internasional. *Political globalization* atau globalisasi politik ditandai dengan digantikannya *nation state* oleh organisasi internasional dan munculnya politik global. *Cultural globalization* atau globalisasi budaya ditandai dengan aliran informasi, simbol dan tanda ke seluruh bagian dunia.

Pengaruh globalisasi politik adalah akan semakin menguatnya pengaruh ideologi liberal dalam perpolitikan negara-negara berkembang yang ditandai oleh menguatnya ide kebebasan dan demokrasi. Pengaruh globalisasi terhadap bidang politik, antara lain membawa internasionalisasi

dan penyebaran pemikiran serta nilai-nilai demokratis, termasuk di dalamnya masalah hak asasi manusia. Disisi lain ada pula masuknya pengaruh ideologi lain seperti ideologi Islam yang berasal dari Timur Tengah. Implikasinya adalah riera semakin terbuka dalam pertemuan berbagai ideologi dan kepentingan politik negara.

Pengaruh globalisasi ekonomi antara lain menguatnya kapitalisme dan pasar bebas. Hal ini ditunjukkan dengan semakin tumbuhnya perusahaan-perusahaan *transnasional* yang beroperasi tanpa mengenal batas-batas negara. Selanjutnya juga akan semakin ketatnya persaingan dalam menghasilkan barang dan jasa dalam pasar bebas. Kapitalisme juga menuntut adanya ekonomi pasar yang lebih bebas untuk mempertinggi asas manfaat, kewiraswastaan, akumulasi modal, membuat keuntungan, serta manajemen yang rasional. Ini semua menuntut adanya mekanisme global baru berupa struktur kelembagaan baru yang ditentukan oleh ekonomi raksasa.

Pengaruh globalisasi sosial budaya adalah masuknya nilai-nilai dari

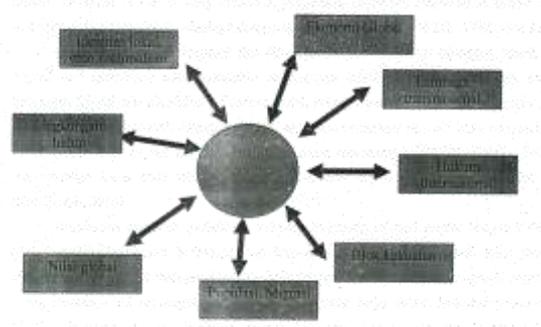
peradaban lain. Hal ini berakibat timbulnya erosi nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa, yang menjadi jati dirinya. Pengaruh ini semakin lancar dengan pesatnya media informasi dan komunikasi seperti televisi, komputer, satelit, internet, dan sebagainya. Masuknya nilai budaya asing akan membawa pengaruh pada sikap, perilaku dan kelembagaan masyarakat.

C. Posisi Negara Bangsa dalam Era Global

Globalisasi abad XXI diyakini berpengaruh besar terhadap terhadap kehidupan suatu bangsa. Globalisasi akan menimbulkan ancaman dan tantangan yang ditengarai bisa berdampak negatif bagi bangsa dan negara. Namun di sisi lain globalisasi memberikan peluang yang akan berdampak positif bagi kemajuan suatu bangsa.

Oleh karena itu , dalam era global ini perlu kita ketahui macam ancaman atau tantangan apa yang diperkirakan dapat melemahkan posisi negara -bangsa. Perlu disadari bersama bahwa globalisasi menghadirkan

fenomena-fenomena baru yang sebelumnya belum pernah dihadapi oleh negara bangsa. Fenomena baru itu misalnya hadirnya perusahaan multinasional, semakin luasnya perdagangan global, dan persoalan lingkungan hidup. Kondisi negara-bangsa dewasa ini digambarkan sebagai berikut;



(Sumber diolah dari Poppy S Winanti, 2002)

Apakah fenomena baru di era global ini akan memperlemah kekuatan suatu bangsa ataukah justru akan memperkuat kemampuan bangsa dalam menjamin kelangsungan hidupnya? Fenomena ini akan memunculkan dua potensi yaitu ancaman atau peluang. Ancaman dan potensi akan berdampak berbeda-beda tiap negara. Hal ini dikarenakan kondisi tiap negara juga berbeda-beda baik dari segi keadaan

geografinya, kemampuan penduduk, sistem politik, sistem pertahanan dan yang lainnya. Akhirnya tergantung pada kemampuan nasional negara yang bersangkutan dalam mengelola aspek-aspek kehidupan yang terkena dampak dari fenomena global.

Dalam menghadapi globalisasi ini, bangsa-bangsa di dunia memberi respons atau tanggapan yang dapat dikategorikan sebagai berikut.

- a. Sebagian bangsa menyambut positif globalisasi karena dianggap sebagai jalan keluar baru untuk perbaikan nasib umat manusia.
- b. Sebagian masyarakat yang kritis menolak globalisasi karena dianggap sebagai bentuk baru penjajahan (kolonialisme) melalui cara-cara baru yang bersifat transnasional di bidang politik, ekonomi dan budaya.
- c. Sebagian yang lain tetap menerima globalisasi sebagai sebuah keniscayaan akibat perkembangan teknologi informasi dan transportasi, tetapi tetap kritis terhadap akibat negatif globalisasi.

Tampaknya bagi negara-bangsa Indonesia, globalisasi sebagai sesuatu

yang tidak bisa ditolak. Berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia menyiratkan bahwa Indonesia ikut serta dalam arus global. Misalnya dengan ikut serta dalam forum WTO, APEC, dan AFTA.

Globalisasi perlu diwaspadai dan dihadapi dengan sikap arif bijaksana. Salah satu sisi negatif dari globalisasi adalah semakin menguatnya nilai-nilai materialistis pada masyarakat Indonesia. Di sisi lain nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramahan sosial, dan rasa cinta tanah air yang pernah dianggap sebagai kekuatan pemersatu dan ciri khas bangsa Indonesia, makin pudar. Sisi negatif ini dimungkinkan karena masuknya nilai-nilai global. Inilah yang menyebabkan krisis pada jati diri bangsa. Globalisasi dapat melongsorkan identitas nasional (Kalidjernih, 2010).

Bagaimana pengaruh globalisasi terhadap Indonesia sebagai negara bangsa ? Globalisasi telah melanda kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Globalisasi telah memberikan pengaruh besar dalam kehidupan bersama, baik pengaruh positif maupun

pengaruh negatif. Proses saling memengaruhi sesungguhnya adalah gejala yang wajar dalam interaksi antarmasyarakat. Melalui interaksi dengan berbagai masyarakat lain, bangsa ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang menghuni Nusantara (sebelum bangsa Indonesia terbentuk) telah mengalami proses dipengaruhi dan memengaruhi. Pada hakikatnya, bangsa Indonesia atau bangsa-bangsa lain berkembang karena adanya pengaruh-pengaruh luar. Kemajuan bisa dihasilkan oleh interaksi dengan pihak dari luar. Gambaran di atas menunjukkan bahwa pengaruh dunia luar adalah sesuatu yang wajar dan tidak perlu ditakutkan. Pengaruh tersebut selamanya mempunyai dua sisi, yaitu positif dan negatif.

Dari sisi negatif, seperti merebaknya *konsumerisme*, *materialisme*, *hedonisme*, *sekularisme*, mengagung-agungkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemewahan yang tidak semestinya, foya-foya, pergaulan bebas, budaya kekerasan, *pornografi*, *pornoaksi*, dan semacamnya. Pengaruh tersebut bukan saja lewat dunia film,

namun juga lewat media cetak dan televisi dengan satelitnya, serta yang sekarang sedang menjadi *trend* adalah *internet*. Nilai-nilai yang dibawa peradaban global terutama peradaban Barat dapat memberi dampak buruk baru bagi sikap dan perilaku masyarakat Indonesia.

Kecenderungan negatif ini umumnya adalah efek globalisasi dalam dimensi sosial budaya (*cultural globalization*). Cogan and Derricot (1998) mengidentifikasi ada 19 kecenderungan global (*global trend*). Di antara kecenderungan tersebut, globalisasi budaya ini ditunjukkan sebagai berikut;

1. *Individuals, families, and communities will lose political influence due to the increased level of regulation and control by governments*
2. *It will be increasingly difficult to develop a shred belief of the common good*
3. *Drug-related crime will increasingly dominate social life in urban area*

4. *People's sense of community and social responsibility will decline significantly*

5. *Consumerism will increasingly dominate social life*

Sedangkan globalisasi sebagai peluang akan memberi pengaruh positif. Artinya globalisasi membawa serta peradaban luar yang ditengarai berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa Indonesia. Hal-hal positif itu misalnya budaya disiplin, kebersihan, tanggung jawab, *egalitarianisme*, budaya kompetisi, kerja keras, penghargaan terhadap orang lain, demokrasi, jujur, optimis, mandiri, taat aturan, dan sebagainya. Harus diakui bahwa peradaban lama bangsa Indonesia tidak banyak mengenalkan nilai-nilai itu kepada masyarakat luas. Nilai-nilai ini semakin penting dan berkembang ketika pengaruh global mulai muncul.

Jika globalisasi politik dan ekonomi dipandang sebagai menguatnya pengaruh ideologi liberal dalam perpolitikan dan ekonomi dunia, maka globalisasi budaya dapat pula dipandang sebagai homogenisasi kultural (Kalidjernih, 2010), dalam hal ini kultur

liberal. Dikatakan liberal oleh karena proses globalisasi nilai-nilai dari Barat ke peradaban lainnya bercirikan "liberal sekuler" yang sebelumnya adalah peradaban Kristen (Adian Husaini, 2005). Maka yang muncul adalah liberalisasi budaya. Namun selain memunculkan homogenisasi, globalisasi dapat pula menimbulkan hibridisasi dan perbedaan pada wilayah-wilayah yang dijangkaunya. Hibridisasi, misalnya dengan munculnya "glokalisasi", sedangkan perbedaan ditandai dengan tumbuhnya kebangkitan etnik, perjuangan hak-hak pribumi dan gerakan fundamentalisme (Macionis and Plummer, 2005).

Sebagaimana diutarakan di atas, *nation state* seperti Indonesia mesti menghadapi dan terpengaruh isu, nilai-nilai dan efek global ini. *Nation state* Indonesia dengan ideologi nasionalisme, paling tidak sekarang ini "berkonfrontasi" dengan homogenisasi ideologi liberalisme jika globalisasi dipandang sebagai westernisasi_ kebangkitan-kebangkitan etnik/hak-hak pribumi/fundamental religius. Nasionalisme berada dalam

tarikan kanan dan kiri, antara paham global dan *etnonasionalism*.

D. Pentingnya Pendidikan

Kewarganegaraan (Citizenship Education)

Perubahan-perubahan yang amat cepat dan terus menerus baik pada dimensi global itu menuntut pula dilakukannya perubahan dan pembaharuan pendidikan di Indonesia khususnya pendidikan yang menyiapkan warganegara agar dapat menjalani kehidupannya secara baik. Salah satu elemen pendidikan yang bertanggung jawab dalam hal penyiapan warganegara demikian adalah pendidikan kewarganegaraan atau *citizenship education*. Isu global ini tidak dapat dilepaskan dan menjadi bagian penting dari pendidikan kewarganegaraan dewasa ini. Sebagaimana dikatakan oleh Cogan & Derricot (1998) bahwa "*... that current modes of educating for citizenship will not be sufficient as we enter a new century. They require that citizen be able to focus upon many diverse elements, issues dan contexts simultaneously...*". Konsep pendidikan

kewarganegaraan sekarang ini dianggap tidak cukup bagi warganegara untuk memasuki abad baru. Warganegara memerlukan kemampuan untuk menanggapi dan menfokuskan diri pada elemen-elemen yang beragam, berbagai isu dan konteks global.

Dengan demikian karakter warganegara Indonesia yang hendak dibentuk dipengaruhi oleh kepentingan dasar hidup berbangsa dan bernegara namun juga mampu menyesuaikan dengan perkembangan zamannya pula. Hal ini dikarenakan warganegara tidak hanya hidup dalam lingkungan nasional tetapi juga hidup dengan bangsa lain dalam pergaulan internasional. Dengan demikian, karakter warganegara global dan untuk masa depan dewasa ini menjadi penting bagi perubahan konsep pendidikan kewarganegaraan. Cogan & Derricott (1998) menyebutnya sebagai warganegara multidimensional (*multidimensional citizenship*) dengan delapan karakteristik sebagai berikut:

1. kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota masyarakat global; (*the ability-to*

- look at and approach problem as a member of global society)*
2. kemampuan bekerja sama dengan yang lain dengan cara yang kooperatif dan menerima tanggung jawab atas peran/tugasnya di dalam masyarakat; *(the ability to work with others in a cooperative way and to take responsibility for one's rules /duties within society)*
 3. kemampuan memahami, menerima, menghargai dan dapat menerima perbedaan-perbedaan budaya; *(the ability to understand, accept, appreciate and tolerate cultural differences)*
 4. kapasitas berpikir dengan cara yang kritis dan sistematis; *(the capacity to think in a critical and systematic way)*
 5. keinginan untuk menyelesaikan konflik dengan cara tanpa kekerasan; *(the willingness to resolve conflict in a non violent manner)*
 6. keinginan untuk mengubah gaya hidup dan kebiasaan konsumtifnya untuk melindungi lingkungan; *(the willingness to change one's life style and consumption habits to protect the environment)*
 7. kemampuan bersikap sensitif dan melindungi hak asasi manusia (misalnya, hak wanita, hak etnis minoritas, dan lain-lain); *(the ability to be sensitive towards and to defend human rights (eg. rights of women, ethnic minorities and)* dan
 8. keinginan dan kemampuan untuk ikut serta dalam politik pada tingkat lokal, nasional dan internasional *(the willingness and ability to participate in politics at local, national and international levels)*

Delapan karakteristik warganegara ideal yang menjadi tujuan pendidikan kewarganegaraan, oleh Cogan dipercayai sebagai sifat dan ciri dari warganegara yang sukses untuk bisa menjalani kehidupan di abad-21. Terkait dengan karakter atau atribut warganegara global di atas, menuntut pula pembaharuan konsep pendidikan kewarganegaraan di Indonesia untuk mampu mewujudkan warganegara ideal tersebut.

Namun jika ditelaah lebih lanjut, tawaran yang diberikan Cogan &

Derricot (1998) termasuk para komunitas ahli Pendidikan Kewarganegaraan lain, seperti MS Branson (1998), Bahmueller & Patrick (1999), CICED (1999) menunjukkan kecenderungan PRn untuk "larut" dalam pergerakan global. Salah satu kecenderungan utamanya adalah menjadikan PKn sebagai pendidikan demokrasi dimana demokrasi adalah salah satu isu utama globalisasi.

Jadi, isu demokrasi sebagai gagasan kuat telah menjadikan pendidikan demokrasi itu sendiri sebagai esensi atau jati diri dari pendidikan kewarganegaraan (CICED: 1999; Udin, 2001). Ada hubungan yang amat erat antara *citizenship education* dan demokrasi. Yvonne Hebert menyatakan "*Citizenship education is the preparation of individuals to participate as active and responsible citizens in a democracy* " (www.youthfluence.com) Pendapat lain menyatakan "*Civic education in a democracy is education in self-government. Self-government means active participation in self-governance, not passive acquiescence in the actions*

of others" (Quigley & Bahmuller, CF. 1991).

Penulis berpendapat, PKn sebagai pendidikan yang sifatnya interdisipliner dapat saja mengemban misi sebagai pendidikan demokrasi sebagai antisipasi kecenderungan global dewasa ini. Namun, menjadikan PKn sebagai pendidikan demokrasi kiranya masih kurang, sebab kita tidak cukup dengan *out world looking* tetapi juga tetap menjadikan *in world looking* sebagai cara pandang. Artinya kita mempergunakan PKn itu dari, oleh dan untuk kita sebagai bangsa. Pendekatan *in world looking* beranjak dari asumsi bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak lepas dari konteks maupun kepentingan bangsa yang bersangkutan. Boleh jadi cara melihat seperti ini dipandang tradisional, mengesankan *republicanism*, terpengaruh oleh filsafat pendidikan *perrenialism* dan ada dalam masyarakat komunitarian. Bertolak belakang dengan tradisi modern di Barat, filsafat pendidikan *proggresivism*, dan teori kewarganegaraan liberal.

Gagasan ini bisa dirunut dari pertama, definisi kerja PKn menurut

William Galston (1989) bahwa bahwa pendidikan kewarganegaraan perdefinisi adalah pendidikan di dalam dan demi tatanan politik yang ada. Pendidikan kewarganegaraan adalah bentuk pengemblengan individu-individu agar mendukung dan memperkuat komunitas politiknya sepanjang komunitas politik itu adalah hasil kesepakatan. Tidak mungkin pendidikan kewarganegaraan itu menentang atau berlawanan dengan komunitas politiknya. Sebaliknya pendidikan kewarganegaraan itu gagal bila ia tidak mendukung dan memperkuat komunitas tersebut. Kedua, definisi PKn menurut Will Kymlicka (2001) bahwa pendidikan kewarganegaraan bukan melulu mengajarkan tentang fakta-fakta dasar tentang berbagai prinsip konstitusional, tetapi ia adalah persoalan menanamkan berbagai kebiasaan, kebaikan serta jatidiri tertentu kepada warganya. Ketiga, bahwa PKn suatu negara tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, sebagaimana dikatakan David Kerr (1999) yakni : *historical tradition, geographical position, socio-political structure,*

economic system, and global trends dan *structural factors* yang meliputi : *organization of, and responsibilities for education, educational values and aims, and funding and regulatory arrangements.*

Jadi, misi apa lagi yang seharusnya dan bisa dilakukan oleh PKn terkait dengan kecenderungan global saat ini? Jika kita kembali pada pernyataan bahwa globalisasi dapat melongsorkan bentuk-bentuk identitas nasional, maka penguatan identitas nasional berikut ideologi nasionalisme menjadi penting kembali untuk ditampilkan. Oleh karena itu penting untuk memposisikan PKn sebagai pendidikan kebangsaan atau *nationalism education*.

Sebenarnya dalam komunitas internasionalpun, PKn sebagai pendidikan kebangsaan atau *nationalism education* diakui, hanya saja sekarang ini dianggap sebagai pendekatan tradisional, karena lebih menekankan pada loyalitas dan pemenuhan kewajiban-kewajiban warga negara dari pada isu-isu seperti *human rights, globalization, equality, multiculturalism, diversity* dan *pluralism*

(Alberta, 2005). Di negara-negara liberal, *patriotism education* dianggap memunculkan kontroversial karena bisa menimbulkan dilema antara menumbuhkan warga negara yang loyal dan kohesi sosial dengan penumbuhan warga negara yang kritis, dan membolehkan perbedaan pendapat (Michael Merry, 2009). Sementara itu, di negara-negara timur, PKn sebagai *nationalism education* tetap diberlakukan dalam fungsinya untuk menanamkan perasaan identitas nasional, loyalitas pada negara dan semangat patriotism, seperti di Jepang, Thailand, dan Singapura, bersamaan dengan fungsinya sebagai pendidikan moral (Yan Wing Leung & Murray Print, 2002).

Terlepas dari kontroversi yang muncul, yang dimungkinkan oleh perbedaan paham dan teori kewarganegaraan yang ada, gagasan menjadikan PKn sebagai pendidikan kebangsaan di Indonesia tampak jelas dengan ungkapan dalam penjelasan atas pasal 37 Undang-Undang No 20 tahun 2003 bahwa "pendidikan kewarganegaraan adalah dimaksudkan

untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki **rasa kebangsaan dan cinta tanah air** (*cetak tebaljjeri*)". Sudut pandang ini selanjutnya secara implisit termuat pula dalam PKn sekolah, sebagaimana tertuang dalam Bagian Pendahuluan Standar Isi PKn, Permendiknas No 22 tahun 2006. Bagian Pendahuluan dokumen tersebut menyatakan sebagai berikut;

"Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia". "Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perlu ditingkatkan secara terus menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, negara Indonesia telah diciptakan sebagai Negara Kesatuan dengan bentuk Republik". "Dalam perkembangannya sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan penghujung abad ke-20, rakyat Indonesia telah

mengalami berbagai peristiwa yang mengancam keutuhan negara. Untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat serta konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Negara Republik Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai generasi penerus."

Dari dokumen formal ini, tampak bahwa politik pendidikan di Indonesia berupaya menjadikan PKn sebagai pendidikan kebangsaan. Jika ditelusuri lanjut Bagian Pendahuluan ini, PKn Indonesia tidak hanya mengemban misi sebagai pendidikan kebangsaan, tetapi juga pendidikan demokrasi, pendidikan kesadaran berkonstitusi, pendidikan bela negara, pendidikan HAM, pendidikan lingkungan hidup, pendidikan multikultural, pendidikan hukum, dan pendidikan anti korupsi. Misi yang banyak dan beragam dari PKn ini memang mencerminkan PKn bidang yang "lintas disiplin" (Udin, 2001) atau "disiplin ilmu terintegrasi" (Sapriya, 2010). Penulis berpendapat, meskipun

PKn bersifat interdisiplin dan dapat dikembangkan dalam berbagai misi, namun PKn dalam konteks ruang dan waktu tertentu, tidaklah harus mengemban semua misi yang ada. Janganlah mengesankan PKn sebagai "obat mujarab" untuk menyembuhkan semua problem komunitas. Untuk kurun waktu dan konteks yang tepat, PKn dapat difungsikan dengan misi yang tepat pula.

E. Penguatan 4 Pilar Kebangsaan

Empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika) yang sekarang ini tengah gencar disosialisasikan oleh MPR memiliki makna penting, manakala PKn difungsikan sebagai pendidikan kebangsaan termasuk pula pendidikan karakter kebangsaan. Keempat pilar tersebut, menurut hemat penulis, berintikan pesan kebangsaan yang nantinya dapat disampaikan melalui PKn sebagai jalur pendidikan.

PKn sebagai pendidikan kebangsaan juga merupakan antisipasi atas efek global sebagaimana fungsi PKn sebagai pendidikan demokrasi. Dimensi

kebangsaan dalam alam global menunjukkan relevansinya. Proses globalisasi telah memperlemah atau melongsorkan bentuk-bentuk identitas kultural suatu bangsa. Di atas tataran kultur nasional, identifikasi global mulai mendislokasikan dan kadang-kadang menggantikan identifikasi nasional (Kalidjernih, 2009). Globalisasi pada hakekatnya merupakan gerakan kapitalisme internasional yang dilandasi oleh ideologi "neoliberal" dimana munculnya liberalisme menimbulkan semacam hukum rimba yang berdasar *survival of the fittes*. Karena itu kita perlu memiliki jatidiri bangsa (Daniel Sukemi, 2007). Untuk dapat bertahan dari terpaan globalisasi yang *inhuman* maka pribadi atau bangsa perlu memiliki identitasnya sendiri. Apabila seseorang atau suatu masyarakat tidak mempunyai keterikatan terhadap etnis atau dengan jatidirinya sebagai bangsa maka pribadi atau bangsa tersebut akan kehilangan pegangan akibat terpaan globalisasi (HAR Tilaar, 2007).

Empat pilar ini selanjutnya dalam kurikulum pendidikan dapat dijadikan materi pembelajaran (*instructional*

material) PKn. Sekarang ini ada kabar bahwa revisi kurikulum PKn sekolah terkait dengan dimasukkannya empat pilar kebangsaan ini sebagai materi pelajaran. Oleh karena akan dijadikan materi, maka yang diperlukan adalah pendasarannya pada filsafat pendidikan dan model kurikulum yang dianut sampai pada pengorganisasian materi ajar tersebut secara ilmiah dan psikologis pedagogis. Secara ilmiah artinya dibuat secara benar dan secara akademik dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, termasuk menghilangkan sisi-sisi doktriner dari bahan tersebut. Harus diakui bahwa 4 pilar kebangsaan ini termasuk bahan PKn yang *unavoidable indoctrination*. Secara psikologis pedagogis, artinya bahan diorganisasikan sesuai dengan tingkat perkembangan anak, memudahkan pembelajaran dan efektif.

Terkait dengan pilar pertama, Pancasila dapat menjadi "core"-nya PKn di Indonesia (Puskur, 2007). Perkembangan materi Pancasila dalam PKn selama ini menunjukkan bahwa materi Pancasila dikembangkan sebagai materi "rumus" dan "isi" Pancasila, serta

ada kehendak menjadikan Pancasila sebagai *genetivus subyektivus* untuk kajian PKn, sehingga muncul tahapan "Pembelajaran tentang Pancasila, Pembelajaran ber_Pancasila dan Pembelajaran untuk Pancasila" (Winarno, 2011). Masalah utama yang dihadapi adalah materi Pancasila yang manakah yang seharusnya dimasukkan dalam PKn baik materi isi atau materi rumusnya, mengingat Pancasila sebagai konsep memiliki keragaman dan perpleksitas pemikiran (Pranarka, 1985: Eka Darmaputra, 1997; Asaad Said AH, 2009). Sebagai pemikiran akademik, Pancasila bisa didekati melalui pendekatan filsafat, sejarah, sosiologis, hukum dan ilmu politik berikut tafsir-tafsir yang muncul darinya, baik tafsir filosofis, historis, sosiologis, yuridis, dan politis. Terkait keragaman pemikiran Pancasila ini, membawa konsekwensi bahwa dengan isi Pancasila, PKn di Indonesia tidak hanya sebagai pendidikan kebangsaan.

Berikut ini penulis kemukakan tiga kategori konseptual Pancasila yakni Pancasila jatidiri bangsa, Pancasila ideologi kebangsaan dan Pancasila dasar

negara. Penempatan lingkup materi Pancasila ini berimplikasi pada fungsi PKn. Materi Pancasila juga berkaitan dengan jenis tafsir yang dapat digunakan.

Hubungan antara Materi Pancasila dan Fungsi PKn

Materi Pancasila sebagai Isi PKn	Fungsi PKn
Pancasila sebagai jati diri bangsa	Sebagai pendidikan nilai moral
Pancasila sebagai ideologi kebangsaan	Sebagai pendidikan kebangsaan
Pancasila sebagai dasar Negara	Sebagai pendidikan politik dan hukum

Materi isi Pancasila dan jenis Tafsir yang digunakan

Materi Pancasila	Jenis tafsir yang digunakan
Pancasila sebagai jati diri bangsa	Tafsir sosiologis dan filosofis
Pancasila sebagai ideologi kebangsaan	Tafsir histori pendiri bangsa
Pancasila sebagai dasar Negara	Tafsir yuridis dan filosofis

Materi Pancasila dalam PKn termasuk bahan yang bersifat "The Great Ough" yang tidak dapat dihindari untuk disampaikan kepada peserta didik (*unavoidable indoctrination*) dalam rangka pembentukan semangat kebangsaan, cinta tanah air dan pembangunan karakter keindonesiaan (*nation charachter building*). Materi

Pancasila mengandung unsur filsafat pendidikan perrenialisme oleh karena ia merupakan nilai-nilai luhur sebagai warisan bangsa. Materi Pancasila dalam ilmu sosial termasuk bahan yang *sifatnya formal structure content* sebagai unsur perekat dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu isi bahan yang tersaji seharusnya sama dan tetap. Materi Pancasila tersebut meliputi "rumus" Pancasila yakni Pancasila jati diri bangsa, Pancasila ideologi kebangsaan, dan Pancasila dasar negara. Sebagai mated yang bersifat *formal structure content*, materi Pancasila tidaklah netral secara akademik. Ia terkait dengan kepentingan sebuah bangsa yakni penting untuk melestarikan dan mewariskannya kepada tiap-tiap generasi. Pancasila telah diterima sebagai nilai kebajikan bersama, yang dalam gagasan kewarganegaraan komunitarian, dianggap sebagai konsepsi tentang kehidupan yang baik. Bangsa dalam hal ini penyelenggara negara berhak menyampaikan nilai-nilai kebajikan itu kepada warganya guna menjaga eksistensi dan keberlangsungan masyarakat itu sendiri.

Selanjutnya, PKn dalam mengembangkan materi Pancasila dapat memerinci lebih jauh materi tersebut disesuaikan dengan tiga dimensi kompetensi yang ada pada bidang PKn. Penulis dengan mendasarkan pendapat M S Branson (1998) dan Quigley, Buchanan & Bahmueller (1991) membedakan tiga kompetensi dalam PKn yakni *Civic Knowledge*, *Civic Skill* dan *Civic Virtue*. Dalam konteks materi Pancasila, *civic knowledge* adalah pengetahuan kewarganegaraan yakni pengetahuan atas Pancasila pandangan hidup bangsa, ideologi kebangsaan, dan dasar negara serta isi yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. *Civic skill* meliputi ketrampilan intelektual yang sesungguhnya sesuatu yang *inseparable* (M S Branson, 1998) atau tidak dapat dipisahkan dari kontennya (*content knowledge*) dan ketrampilan berpartisipasi. Ketrampilan intelektual ini meliputi kemampuan menjelaskan, menganalisis dan berfikir kritis atas Pancasila. Kemampuan berpartisipasi ini misalnya kemampuan peserta didik untuk menyuarakan pentingnya Pancasila pada masyarakat luas dan

upaya mempertahankannya. *Civic virtue* meliputi *civic commitment*, dan *civic disposition*. *Civic commitment* adalah dengan menerima Pancasila, berkomitmen terhadap Pancasila, loyalitas terhadap Pancasila, menghormati dan menghargai Pancasila. Sedangkan *civic disposition* adalah nilai-nilai dasar yang bersumber dari Pancasila yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik yakni religius, manusiawi, nasionalis, demokratis dan adil.

Materi Pancasila dalam hubungannya dengan dimensi kompetensi dalam PKn tersebut dapat dideskripsikan pada tabel sebagai berikut;

Materi Pancasila dalam dimensi PKn

Dimensi PKn	Penjabaran	Isi
Civic Knowledge	Content Knowledge Pancasila dalam PKn	Pengetahuan atas pancasila pandangan hidup bangsa, ideology kebangsaan dan dasar Negara pengetahuan atas isi sila-sila Pancasila
Civic Skill	Intellectual skill	Kemampuan menjelaskan, menganalisis dan berfikir kritis atas Pancasila
	Participation skill	Kemampuan mempertahankan

		pancasila
Civic Virtue	Civic commitment	Kemampuan, loyalitas, bersikap positif, menghormati dan menghargai Pancasila
	Civic disposition	Sikap religius, manusiawi, nasionalis, demokratis dan adil

Pilar yang kedua yakni UUD NRI 1945 pada dasarnya merupakan dimensi yuridis Pancasila dasar negara. UUD 1945 (pasal-pasal) merupakan pencerminan dari nilai-nilai luhur Pancasila sebagaimana termuat dalam Bagian Pembukaan. Pesan yang hendak disampaikan melalui materi UUD 1945 adalah agar warga negara memiliki pengetahuan atas UUD 1945, bersikap positif terhadap UUD 1945 dan selanjutnya berperilaku konstitusional atau menjadi warga negara yang "konstitusionalis" (istilah dari SBY).

Menempatkan UUD 1945 sebagai bagian dari materi PKn menjadikan PKn sebagai pendidikan kesadaran berkonstitusi. Pesan atau misi tersebut sebenarnya termuat pula dalam Standar Isi PKn sekolah bahwa "konstitusi Negara Republik Indonesia

perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai generasi penerus"

(Permendiknas No. 22 Tahun 2006). Persoalan yang muncul adalah bilamana tafsiran-tafsiran yuridis yang diberikan melalui pasal-pasal UUD 1945 dipandang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental Pancasila. Para pelaku praksis pendidikan (guru dan dosen PKn) kemungkinan akan kesulitan dalam menjelaskan perbedaan-perbedaan yang muncul.

Pilar ketiga NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) juga lebih merupakan pesan kebangsaan yakni komitmen seluruh warga bangsa untuk tetap mempertahankan dan melestarikan bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik. Berkomitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tipe *nation state*, sekaligus pula menanamkan ide nasionalisme, karena nasionalisme merupakan dasar pembentukan dari negara nasional modern (Saafroedin Bahar, 1996). Negara bangsa modern secara moral dan politis dijustifikasi oleh konsep nasionalisme (Mark

Juergensmeyer, 1998). Tantangan atas ide nasionalisme di Indonesia selain dari paham individualisme liberalisme juga bisa muncul dari gerakan etnonasionalisme dan keagamaan transnasional. Pancasila, jika merujuk pada gagasan awal Ir. Soekarno sebenarnya merupakan ideologi nasionalisme.

Pilar keempat prinsip Bhineka Tunggal Ika dapat dipandang sebagai pilihan strategi dalam rangka mengintegrasikan bangsa yang plural. Sebagai suatu *nation state* yang plural, pembangunan integrasi penting dilakukan. Integrasi menjadi tugas pokok dari sebuah *nation state*. Bahkan dapat dikatakan persoalan integrasi bangsa hanya ada dalam format negara-bangsa (*nation state*). Pertanyaannya adalah mengapa negara-negara baru seperti Indonesia memerlukan integrasi nasional setelah lepas dari penjajahan. *Pertama*, karena pemerintah kolonial tidak pernah memikirkan tentang perlunya kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat jajahan, tetapi lebih pada penciptaan kesetiaan kelompok -kelompok

masyarakat terhadap penguasa kolonial. *Kedua*, unsur-unsur awal yang membentuk negara-bangsa adalah kesatuan-kesatuan lokal yang bersifat primordial. Integrasi diperlukan untuk menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas - identitas baru yang mengiringi terbentuknya negara.

Ada dua strategi kebijakan integrasi, yakni "policy asimilasionis" dan policy bhineka tunggal ika" (Myron Wiener dalam Yahya Muhaimin dan Collin Me Andrew, 1982). Strategi pertama dengan cara penghapusan sifat-sifat kultural utama dari komunitas kecil yang berbeda menjadi semacam kebudayaan nasional. Strategi kedua, dengan cara penciptaan kesetiaan nasional tanpa menghapuskan kebudayaan lokal. Bhineka Tunggal Ika mencerminkan deskriptive (menggambarkan sekaligus mengakui keadaan obyektif bangsa yang beragam/berbhineka) dan mencerminkan preskriptive (menginginkan terwujudnya kesatuan sebagai formulasi subyektif). Jadi, meskipun berbeda-beda (obyektif) tetapi hendaknya tetap satu jua (subyektif).

Tuntutan menciptakan integrasi nasional dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika tetaplah menghadapi problem yang pelik bagi nation-state Indonesia. Sebab suatu nation state sebagaimana dikatakan Clifford Geertz (Yahya Muhaimin dan Collin Me Andrew, 1982) memiliki dua jenis motif yang kuat dan saling mempengaruhi, berbeda satu sama lain, dan seringkali bertentangan, yakni pertama, usaha mencari identitas (kepribadian) sebagai sesuatu yang penting untuk "menjadi seseorang di dunia" dan dua, kehendak untuk menciptakan suatu negara yang efisien dan dinamis. Motif pertama, berkaitan dengan tuntutan identitas-identitas lokal dan primordial agar diakui sebagai identitas dalam sebuah negara bangsa, sedang motif kedua keinginan membentuk negara bangsa yang mengatasi identitas-identitas tersebut. Kedua motif ini menciptakan dilema bagi upaya pembangunan integrasi. Apalagi ketika sebuah bangsa sudah dalam taraf pembangunan dimana ketidakadilan mulai dirasakan oleh sebagian warga bangsa. Sulit kiranya merasa "satu jua" ketika yang ada adalah

perlakuan tidak adil, yang satu makmur, yang satu semakin miskin.

Pada akhirnya, dapat dikatakan 4 pilar kebangsaan berupaya membawa pesan kebangsaan, semangat bagaimana tetap mempertahankan Indonesia sebagai suatu negara kebangsaan modem. Semangat kebangsaan kiranya masih relevan dalam pergulatannya dengan gejala global sekarang ini. Hanya saja, sebagaimana pernah ditingkatkan oleh Ir. Soekarno bahwa kebangsaan Indonesia haruslah yang hidup dalam dalam taman-sarinya internasionalisme.

Daftar Pustaka

- Adian Husaini. 2005. *Wajah Peradaban Barat. Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekuler Liberal*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Alberta Schools. 2005. *The Hearth of the Matter: Character and Citizenship Education in Alberta Schools*. Canada: Albert
- Alvin Toffler. 1980. *The Third Wave*. USA: Bantam Books
- Asaad Said AH. 2009. *Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Bersama*. Jakarta: LP3S.
- Bahmueller and Patrick. 1999. *Principles and Practices of Education for Democratic Citizenship*. Bloomington. EMC
- Cogan, J & Derricott, Ray. (Eds). 1998. *Citizenship Education For 21st Century; Setting the Context*. London: Kogan Page
- Cogan, J.J. dan Derricott,R. (Ed). 1998. *Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education*, London: Kogan Page.
- Cogan, JJ. 1999. *Developing the Civic Society : The Role Of Civic Education*. Bandung: CICED.
- Daniel Sukemi. 2007. "Pancasila sebagai Djati Diri Bangsa" Proseding Hasil Sarasehan Hari pendidikan Nasional 2007, tanggal 10 Nopember 2007 di Yogyakarta.
- David Kerr. 1999. *Citizenship Education : An Internasional Comparison*. London : NFER Derek Heater,. 2004. *A Brief History of Citizenship*. New York: New York University
- Eka Darmaputra.1997. *Pancasila antara Identitas dan Modernitas. Tinjauan Etis dan Budaya*. Edisi ke-6. Jakarta: Gunung Agung
- Freddy K Kalidjernih, 2009. *Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan*. Bandung: Widya Aksara Press
- Freddy K Kalidjernih, 2010. *Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan Edisi II*. Bandung: Widya Aksara Press

- HAR Tilaar.2007. *Mengindonesia. Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Herimanto dan Winarno.2008. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara
- John Naisbitt, & Patricia. Aburdance. 1991. *Megatrends 2000 New Directions for Tommorrow*. New York: William Morrow & Coy
- Kenichi Ohmae. 1996. *The End of Nation State. The Rise of Regional Economies*. New York: Simon and Schuster Inc.,
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Macionis and Plummer. 2005. *Sociology : A Global Introduction*. New York: Prentice Hall
- Malcom Waters. 1995. *Globalization*. London: Routledge
- Margaret Stimmann Branson, . 1998. *Role of Civic Education, A Forthcoming Education Policy Task Force Position Paper from the Communitarian Network*
- Mark Juergensmeyer. 1998. *Menentang Negara Sekuler*. Pent: Noorhaidi. Jakarta: Mizan
- Michael Merry. 2009. *Patriotism, History and the Legitimate Aims of American Education* in EDUCATIONAL PHILOSOPHY AND THEORY, VOLUME 41 NUMBER 4 AUGUST 2009
- Poppy S Winanti. *Globalisasi dan Negara Bangsa : Kompetensi Perspektif Globalis dan Skepstis dalam Studi Hubungan Internasional* dalam Jurnal Ketahanan Nasional No VII, April 2002
- Pranarka.1985. *Sejarah Pemikiran Pancasila*. Jakarta: CSIS
- Pusat Kurikulum . 2007. *Naskah Akademik Kajian Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan*. Depdiknas: Badan Penelitian dan Pengembangan, Pusat Kurikulum
- Quigley & Bahmuller, CF. 1991. *Civitas : A Framework for Civic Education*. CICIVED
- Quigley, C. N., Buchanan, Jr & J. H., Bahmueller, C. F. 1991. *Civitas : A Framework for Civic Education*. Calabasas : Center for Civic Education
- Saafroedin Bahar. 1996. *Masalah Etnisitas dan Ketahanan Nasional* dalam Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Ketahanan Nasional. Yogyakarta: UGM Press
- Samuel P Huntington. 1996. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. London: Simon & Schuster
- Sapriya, 2010. *Membangun Body Of Knowledge PKn sebagai Disiplin Ilmu Terintegrasi* bahan Proceeding Seminar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Bangsa. Bandung : Lab Prodi PKn UPI

- Udin S Winatapura. 2001. *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana" sistematis pendidikan demokrasi*. Disertasi. Bandung : PPS UPI
- Udin S Winatapura. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan suatu bidang kajian Pendidikan Sosial Berbasis Pendidikan Demokrasi yang bersifat Multifacet. Tinjauan Filosofis Pedagogis*. Makalah disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 1 Oktober 2005 di UNNES Semarang
- Will Kymlicka. 2001. *Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship*. Oxford: Oxford University Press.
- William Galston. 1989. *Civic Education in The Liberal State* dalam Nancy L Rosenblum ed. *Liberal and The Morality Life*. Cambridge Mass, and London: Harvard University
- Winarno. 2009. *Kewarganegaraan Indonesia dari Sosiologis Menuju Yuridis*. Bandung: Alfabeta
- Winarno.2011. *Implementasi Pancasila melalui PKn sebagai Upaya Mengembangkan Jatidiri Bangsa*. Disertasi PKn UPI. Tidak diterbitkan
- Yahya Muhaimin, & Collin Me Andrews (Peny) (1982). *Masalah Masalah Pembangunan Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Yan Weng Leung & Murray Print. 2002. *Nationalistic Education as the Focus for Civics and Citizenship Education : The Case of Hong Kong in Asia Pacific Education Review 2002.*, Vol. 3, No. 2, 197-209
- Sumber internet dan dokumen formal:
- www.wikipedia.or.id
www.youthfluence.com
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Stantar Isi
- Makalah disajikan dalam Seminar Nasional di IKIP PGRI Madiun, tanggal 7 Januari 2012 Dosen Prodi PKn FKIP UNS, koresp
winarno_uns@yahoo.co.id